RESUME MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

NAMA : ROSMADEWI SYALSABILA AMNI

NIM : 10200120174

Pembahasan

HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu :

Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engere zin (dalam arti sempit). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah.

Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Constitutional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Di Perancis orang mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang dilawankan dengan “Droit Administrative”, dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara. Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah Verfassungsrecht: Hukum Tata Negara dan Verwaltungsrecht: Hukum Administrasi negara.

➤ **Pendapat ahli Hukum mengenai definisi Hukum Tata Negara**

1. Menurut Paton George Whitecross
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang dan hubungan antara alat perlengkapan negara itu. Dalam bukunya “textbook of Jurisprudence” yang merumuskan bahwa Constitutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the functions of the organ of the state.
2. Menurut Maurice Duverger
Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara.
3. Menurut Kranenburg
Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara terdapat dalam UUD.
4. Menurut Kusumadi Pudjosewojo
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya

(hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara adalah mengenai organisasi negara yang mencakup mengenai lembaga – lembaga negara, hubungan satu dengan yang lain, dan kekuasaannya. Selain itu, juga mencakup mengenai warga negara termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), dan wilayah negara.

Dalam kaitan dengan ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara, Logemann dalam bukunya “Het Staatsrecht van Indonesie”, seperti dikutip Usep Ranawidjaja, mengatakan bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai organisasi (tata susunan) negara yang mencakup dua bidang pokok, yaitu: hukum mengenai kepribadian hukum dari jabatan – jabatan; dan hukum mengenai lingkungan kekuasaan negara yaitu lingkungan manusia tertentu, lingkungan wilayah tertentu, dan lingkungan waktu tertentu.

➤ **Hubungan Hukum Tata Negara (HTN) Dengan Ilmu-Ilmu Lainnya**

1. Ilmu Negara

Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada HTN positif, sedangkan HTN merupakan kongkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara. [1] Dengan demikian Ilmu Negara sebagai ilmu yang bersifat teoritis memberikan pengetahuan dasar mengenai pengertian-pengertian pokok dan asas-asas pokok tentang Negara pada umumnya. Hal ini merupakan bekal untuk dapat berkecimpung langsung dengan hukum positif yang merupakan salah satu objek HTN. Missal, Ilmu Negara menyediakan teori-teori mengenai bentuk Negara dan pemerintah: pengertian, jenis-jenis, kualifikasi dan sebagainya untuk lebih mudah memahami mengenai bentuk Negara dan bentuk pemerintahan suatu Negara tertentu yang dipelajari oleh HTN.

2. Ilmu Politik

Hubungan HTN dengan Ilmu Politik pertama kali dikemukakan oleh J. Barent di dalam bukunya *De Wetenschap der Politiek*. Hubungan ini diungkapkan dengan suatu perumpamaan : *het vlees omhet geraamte van de staat*. Artinya bahwa HTN sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu politik sebagai daging yang melekat disekitarnya.

Lebih lanjut, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menerangkan bahwa pertautan HTN dan Ilmu politik disebabkan Ilmu Politik diperlukan untuk mengetahui latar belakang dari suatu perundang-undangan. Disamping itu, keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap HTN. Bahkan, studi HTN tidak mungkin dapat dipisahkan dari politik.

3. Hukum Administrasi Negara (HAN)

Van Vollenhoven dalam bukunya *Omtreck van het Administratiefrecht* mengemukakan bahwa badan-badan Negara tanpa HTN akan lumpuh bagaikan tanpa sayap, karena badan-badan Negara itu tidak memiliki wewenang. Sebaliknya, apabila badan-badan Negara tanpa adanya HAN menjadi bebas tanpa batas, sebab dapat berbuat menurut kehendaknya. Oleh karena itu, HAN dan HTN mempunyai hubungan yang bersifat komplementer dan independen. Oleh karena itu keduanya sukar untuk dipisahkan.

4. Hukum Internasional

C. Parry dalam bukunya, “*Manual of Public International Law*” (dikutip oleh Wade and Phillips) mengatakan bahwa: HI berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu Negara dengan Negara-negara lain. HTN mengatur hubungan Negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah Negara. Keduanya memperhatikan mengenai masalah pengaturan nilai-nilai dan proses hukum kekuasaan besar yang dimiliki oleh Negara modern. Pada prinsipnya sistem hukum nasional dan HI berlaku pada level berbeda, tetapi satu cabang penting HTN adalah hukum nasional yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah untuk mengadakan perjanjian internasional- traktat dengan Negara-negara lain yang menimbulkan kewajiban-kewajiban internasional baru.

Selain itu, ada juga teori *Selbsi-limitation theorie*, yang diperkenalkan oleh penganut paham monism, terutama yang terkenal : George Jellineck dan Zorn berpendapat bahwa Hukum Internasional itu tidak lain daripada HTN yang mengatur hubungan luar suatu Negara. HI bukan suatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan Negara.

Kedua pandangan di atas menunjukkan bahwa HTN dan HI memiliki hubungan yang saling membutuhkan dimana HTN memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi penerapan HI. HI pun memiliki fungsi-fungsi penting bagi penerapan HTN.

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Sumber Hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang memaksa, mengikat, dan apabila aturan tersebut dilanggar terdapat sanksi yang tegas. (utrecht “ Pengantar Hukum Indonesia”)

Utrecht, mengatakan bahwa kebanyakan para ahli memberikan istilah sumber hukum berdasarkan sudut pandang keilmuannya. Yakni:

1. Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli sejarah;
2. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli filsafat
3. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli sosiolog
4. Sumber hukum ditinjau dari sudut ahli ekonomi.

5. Sumber hukum ditinjau dari sudut ahli religius
6. Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli hukum.

Sumber Hukum Tata Negara terbagi menjadi dua yaitu :

A. SUMBER HUKUM MATERIIL

Ialah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum.

Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum.

Dengan kata lain, Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum bahwa sumber hukum yang berlaku di Indonesia baik formal maupun materiil seluruhnya bersumber pada Pancasila.

Beberapa alasan Pancasila sebagai sumber tertib Hukum di Indonesia, yakni:

- a. Pancasila merupakan isi dari sumber hukum;
- b. Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara;
- c. Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang dibuat, diberlakukan, segala sesuatu peraturan perundang-undangan atau hukum apapun bertentangan dengan jiwa Pancasila harus dibatalkan/tidak berlaku

B. SUMBER HUKUM FORMIL

Yaitu, sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya inilah, sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum itu berlaku umum.

Sumber hukum formil Hukum Tata Negara, meliputi:

1. Undang-undang;
2. Kebiasaan (custom) dan adat
3. Perjanjian antara negara (traktat)
4. Keputusan hakim (jurisprudensi)
5. Pendapat ahli hukum terkemuka (doktrin)

➤ Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, disamping UUD berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis yang merupakan sumber hukum, misalnya kebiasaan, traktat, dsb.

Isi suatu UUD pada pokoknya memuat cita-cita bangsa, garis besar, asas dan tujuan negara, pengaturan kelembagaan negara, Hak asasi manusia, pengaturan tentang peraturan perundang-undangan dan segala sesuatu yang pengaturan bersifat dasar, maka dari itu UUD disebut sebagai *Frame work of the nation* (K. Wantjik Saleh)

Sebagai Sumber Hukum Formil, UUD 1945 meliputi;

- a. Merupakan Hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan;
- b. Merupakan hukum dasar bagi pengembangan peraturan perundang-undangan

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

Asas hukum merupakan jembatan antara norma hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Sehingga untuk memahami peraturan hukum suatu bangsa, maka harus diawali dengan memahami asas-asas hukumnya.

Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum.

➤ **Asas Hukum Tata Negara Indonesia**

1. Asas Pancasila

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah / asas basic country is pancasila that artinya setiap tindakan / perbuatan baik tindakan pemerintah atau perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sehingga setiap isi peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam pancasila. Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan konstitusional perusahaan negara republik Indonesia. Perubahan undang-undang dasar 1945 mengandung empat pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.

2. Asas Negara Hukum

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum dimana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945". Atas ketentuan yang tegas diatas maka setiap sikap kebijakan dan tindakan tindakan negara berikut rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian semua pejabat / alat-alat negara tidak akan bertindak sebagai penguasa sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Kedaulatan yaitu kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat. Soal pemerintah melaksanakannya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar 1945 berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut baik-baik tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945.

4. Asas Negara Kesatuan

Negara kesatuan dideklarasikan pada saat pernyataan / memproklamirkan kemerdekaan para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan "Negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik". Negara kesatuan adalah kekuasaan negara tertinggi semua urusan negara

ada ditangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan kekuasaan tertinggi dalam negara adalah pemerintah pusat.

5. Asas Pembagian kekuasaan dalam check and balances

Pengertian pembagian kekuasaan adalah terpisah dari pemisahan kekuasaan. Pemisahaan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh:

John Locke yaitu Kekuasaan legislatif, Kekuasaan eksekutif, Kekuasaan federatif. Sedangkan Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu trias politica, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lain baik mengenai orang maupun fungsinya.

Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh.

Satjipto Rahardjo (1986:87) menyatakan asas hukum, bukan peraturan hukum. Namun, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa menge-tahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum.

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

Secara garis besar sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu:

1. Periode pertama yang berlangsung pada 17 Agustus - 27 Desember 1949

- UUD yang berlaku adalah UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
- Menurut UUD 19945 (pasal 1 ayat 2) yang berdaulat adalah rakyat dan dilakukan MPR yang memiliki wewenang antara lain:
 - Menetapkan UUD
 - Memilih dan mengangkat
 - Menetapkan GBHN
 - Mengubah UUD
- Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri
- Menteri-menteri bertanggung jawab pada presiden
- Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, sehingga DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Demikian sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kedudukan DPR dan presiden sama-sama kuat.

2. Periode kedua yang berlangsung pada 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

- Kekalahan Jepang dari sekutu mengharuskannya menyerahkan wilayah jajahannya. Kesempatan ini dipergunakan Belanda untuk merebut kembali bekas jajahannya di Indonesia.

- Indonesia sudah bertekad mempertahankan kemerdekaannya dengan segala upaya dengan semboyan “*Sekali merdeka tetap merdeka*”
- Puncak dari perselisihan Indonesia-Belanda diadakan KMB (Konferensi Meja Bundar) 2 November 1949 yang isinya:
 - Didirikan negara-negara RIS
 - Penyerahan kedaulatan kepada RIS
 - Didirikan UNI antara RIS dan kerajaan Belanda

3. Periode ketiga yang berlangsung dari 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959

- Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (1949) merupakan perobahan sementara, terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia, sehingga akhirnya otinggal tiga negara bagian yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.
- Akhirnya mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia 19 Mei 1950.
- Kemudian dibentuklah suatu Panitia bersama yang menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950,
- Jalan yang ditempuh untuk memeperlakukan undang-undang dasar 1950 dengan menggunakan pasal 190,127 a dan pasal 191 ayat 2 UUD RIS tentang perubahan undang-undang dasar maka dengan undang-undang federal no 7 tahun 1950 lembaran negara RIS 1950 no 56 resmilsh UUD RIS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950.
- Undang-Undang dasar 1950 bersifat sementara , ini disebabkan karena badan yang menyusun UUD 1950 merasa dirinya kurang representatif sama halnya dengan badan yang menyusun UUD 1949
- Dibawah UUD 1950 sebagai realisasi dari pasal 134 telah dilaksanakan pemilihan umum pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1953. tanggal 10 Nopember 1956 di Bandung diresmikanlah Konstituante.
- Sementara Konstituante yang telah bersidang belum dapat menyelesaikan tugasnya maka situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan timbul perpecahan Untuk mengatasi hal tersebut tanggal 22 April 1959 atas nama pemerintah, Presiden memberikan amanatnya di depan sidang pleno Konstituante yang berisi anjuran agar Konstituante menetapkan saja Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap bagi Republik Indonesia.

4. Periode ke empat yang berlangsung dari 5 Juli 1959 - sampai sekarang

- Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kenbaliUndang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum dari dekrit ini adalah *staatsnoodrecht*.
- DibawahUndang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 15 tahun 1969, Undang-Undang mana adalah pelakssanaan dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 jo. No. XLII/MPRS/1968.

- Hasil dari pemilihan umum tersebut tanggal 28 Oktober 1971 dilantiklah Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada tanggal 1 Oktober 1972 Majelis Permusyawaratan Rakyat dilantik pula.
- Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat sementara. Kesementaraan ini disebabkan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar, dan ini belum pernah dilakukan, walaupun Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum telah dilantik dan kemudian bersidang pada tahun 1973.

KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

➤ **Pengertian**

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (*fundamental*) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yaitu negara.

Bertolak dari konsepsi tersebut, maka secara umum istilah konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Pengertian konstitusi, dalam prakteknya dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar.

L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau *grondwet* (Undang-undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan *constitution* (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara Sri Soemantri M, dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-undang Dasar. Penyamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia termasuk di Indonesia.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3 yaitu:

1. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*
Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*
Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
3. *Die geshereiben verfassung*
Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa jika Undang-Undang Dasar dihubungkan dengan konstitusi, maka Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis semata, tetapi mengandung pengertian sosiologis dan politis

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:

1. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
2. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-undang Dasar (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Misalnya UUD RI 1945, Konstitusi USA 1787.

➤ **Nilai Konstitusi**

Karl Loewenstein mengadakan suatu penyelidikan mengenai apa arti dari suatu konstitusi tertulis (UUD) dalam suatu lingkungan nasional, terutama bagi rakyat biasa sehingga membawanya kepada tiga jenis penilaian konstitusi sebagai berikut:[7]

1. Nilai Normatif

Nilai ini diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar secara murni dan konsekuen, konstitusi itu ditaati dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikitpun.

2. Nilai Nominal

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab-sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.

3. Nilai Semantik

Suatu konstitusi bernilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum berlaku namun dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedang dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

➤ **Sifat Konstitusi**

1. Bersifat Luwes/Fleksibel

Konstitusi yang bersifat luwes atau fleksibel adalah konstitusi yang baik, karenanya dapat dengan mudah menerima perubahan apabila diperlukan sekali, serta dengan mudah pula dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Bersifat tertulis

Konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal.

3. Bersifat tidak tertulis

Suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal,. Seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand.

➤ **Perubahan Konstitusi**

Secara garis besar konstitusi dapat berubah atau diubah melalui dua jalan, yakni melalui cara berikut:

1. Jalan yuridis formal.

Jalan pertama, dilakukan sesuai dengan ketentuan formal mengenai perubahan konstitusi yang terdapat di dalam konstitusi itu sendiri dan mungkin diatur dalam peraturan perundangan lain.

2. Jalan non yuridis formal atau jalan politis.

Perubahan konstitusi tersebut biasanya terjadi Karena sebab tertentu atau keadaan khusus yang mendorong terjadinya perubahan konstitusi. Perubahan demikian dapat berupa perubahan total atau sebagian ketentuan saja sesuai kebutuhan. Perubahan konstitusi secara politis ini kalau berjalan dan dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat, maka perubahan demikian secara yuridis adalah sah. Atau dengan kata lain, perubahan konstitusi secara de facto yang kemudian dapat diterima oleh seluruh rakyatnya, maka konvensi statusnya berubah menjadi de jure.

Perubahan konstitusi di atas sesuai dengan George Jellinek, yang membedakan dua cara perubahan konstitusi, yaitu melalui cara berikut:

1. Yang disebut "*verfassungs-anderug*", yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan konstitusi.
2. Melalui prosedur yang disebut "*verfassung-wandelung*", yakni perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi sendiri, melainkan melalui jalur istimewa, seperti revolusi, kudeta, dan konvensi.

Dua cara tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi empat macam cara, sebagaimana yang dikemukakan oleh K.C. Wheare, yaitu melalui cara berikut:

1. Perubahan konstitusi yang terjadi akibat kekuatan-kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*), seperti dorongan faktor politik.
2. Perubahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi (*formal amendment*).
3. Perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan (*judicial interpretation*).
4. Perubahan konstitusi oleh suatu kebiasaan dan konvensi yang lahir apabila ada kesepakatan rakyat (*usage and convention*).

Berdasarkan pendapat di atas dapat kita simpulkan terdapat dua macam perubahan konstitusi, pertama perubahan secara formal yakni *formal amendment*, dan kedua perubahan di luar cara formal yakni *some primary force*, *judicial interpretation*, dan *usage and convention*.

ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA

- **Fungsi-fungsi Kekuasaan**

Salah satu ciri negara hukum, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan Negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu di tangan Raja atau Ratu yang memimpin Negara secara turun temurun.

Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan Negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan Negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda-beda, yang dapat dianggap paling berpengaruh pe-mikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu dengan teori trias politica-nya, yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial.

Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan Negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or administrative function), dan yudisial (the judicial function). John Locke juga membagi kekuasaan Negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya.

Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat kedua sarjana itu tampaknya mirip. Akan tetapi, dalam bidang yang ketiga, pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Baron de Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga Negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan ke luar dengan Negara-negara lain. Bagi John Locke penjelmaan fungsi defencie baru timbul apabila fungsi diplomacie terbukti gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif, sedangkan fungsi yudisial bagi Locke cukup dimasukkan ke dalam kategori fungsi eksekutif, yaitu terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum bagi Montesquieu, fungsi pertahanan (defence) dan hubungan luar negerilah (diplomasi) yang termasuk kedalam fungsi eksekutif sehingga tidak perlu disebut tersendiri. Justru dianggap penting oleh Montesquieu adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman.

- **Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan**

Istilah “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan separation of power berdasarkan teori trias politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang harus dibedakan dan dipisahkan secara structural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.

Arthur Mass membedakan pengertian pembagian kekuasaan (division of power) tersebut ke dalam dua pengertian, yaitu: (i) capital division of power; dan (ii) territorial division of

power. Pengertian yang pertama bersifat fungsional, sedangkan yang kedua bersifat kewilayahan atau kedaerahan. Dengan demikian, dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal atau vertikal. Dalam konteks yang vertikal, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan kekuasaan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dan Negara bagian dalam Negara federal (federalstate) atau antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi dalam Negara kesatuan (unitarystate).

Untuk membatasi pengertian separation of powers itu, dalam bukunya Constitutional Theory, G. Marshall membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers) itu ke dalam lima aspek, yaitu:

- 1) Differentiation; doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers) itu bersifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial
- 2) Legal incompatibility of office holding; doktrin pemisahan kekuasaan menghendaki orang yang menduduki jabatan di lembaga legislatif tidak boleh merangkap pada jabatan di luar cabang legislatif.
- 3) Isolation, immunity, independence; doktrin pemisahan kekuasaan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain.
- 4) Checks and balances; dalam doktrin pemisahan kekuasaan itu, yang juga dianggap paling penting adalah adanya prinsip checks and balances, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain.
- 5) Coordinate status and lack of accountability adalah prinsip koordinasi dan kesederajatan, yaitu semua organ atau lembaga (tinggi) Negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dan mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif, tidak bersifat subordinatif satu dengan yang lain.

Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, istilah “pemisahan kekuasaan” (separation of powers) itu sendiri cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan (division of power) yang dikaitkan dengan sistem supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala trias politica Montesquieu.

➤ **Kekuasaan Legislatif**

Yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang. Peraturan yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.

Fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

- a. Prakarsa pembuatan undang-undang
- b. Pembahasan rancangan undang-undang
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang
- d. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi legislasi ini biasanya memang dianggap yang paling penting.

- **Fungsi Pengawasan**

Lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal itu, yaitu: (i) kontrol atas pemerintahan; (ii) kontrol atas pengeluaran; dan (iii) kontrol atas pemungutan pajak.

Secara teoritis, fungsi-fungsi control atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu:

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja Negara
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja Negara
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah
- f. Pengawasan terhadap pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR. Undang-undang dasar dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya mencerminkan norma-norma hukum yang berisi Kebijakan atau state policy yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu yang tidak boleh bertentangan dengan state policy yang tertuang dalam bentuk hukum yang lebih tinggi. Setiap kebijakan dimaksud, baik menyangkut bentuk penguangannya, isinya, maupun pelaksanaannya haruslah dikontrol dengan seksama oleh lembaga perwakilan rakyat.

Demikian pula dengan kegiatan penganggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang terkait erat dengan kinerja pemerintahan, harus pula dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh lembaga perwakilan rakyat.

➤ **Kekuasaan Eksekutif**

- **Sistem Pemerintahan**

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara: (i) sistem pemerintahan presidensial; (ii) sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet; dan (iii) sistem campuran. Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat parlementer apabila (a) sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah; dan (b) jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen sehingga dengan demikian; (c) kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan

parlemen; dan sebaliknya (d) parlemen juga dapat dibubarkan oleh Kepala Negara apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah.

- **Sistem Presidential**

Yang bertanggung jawab adalah Presiden, bukan menteri sehingga sudah seharusnya nuansa pekerjaan para menteri dalam sistem presidentil itu bersifat lebih profesional dari pada politis. Oleh sebab itu, untuk diangkat menjadi menteri seharusnya seseorang benar-benar memiliki kualifikasi teknis dan profesional untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan prinsip meritokrasi.

- **Sistem Parlementer**

Kabinet atau parlementer, Menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan dalam sistem presidentil, para menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam sistem parlementer jelas sekali bahwa kedudukan menteri adalah bersifat sentral. Kinerja pemerintahan sepenuhnya berada ditangan para menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri itu. Karena sangat kuatnya kedudukan para menteri, parlemen pun dapat dibubarkan oleh mereka. Sebaliknya, kabinet juga dapat dibubarkan oleh parlemen apabila mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Demikianlah perimbangan kekuatan di antara cabinet dan parlemen dalam sistem pemerintahan parlementer.

➤ **Kekuasaan Yudikatif**

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan peradilan yang dalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Selain itu, lembaga yudikatif juga bertugas memberikan keputusan dengan adil dalam sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.

Lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan badan eksekutif demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

1. Mahkamah Agung

Sesuai pasal 24A UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili kasus hukum tingkat kasasi. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- Fungsi Peradilan
- Fungsi Pengawasan
- Fungsi Mengatur
- Fungsi Nasihat
- Fungsi Administratif

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki wewenang untuk mengadili [ada tingkat pertama dan terakhir (sifatnya final). Berikut beberapa kewenangan dan kewajiban MK:

- Pengujian UUD 1945 (Judicial Review)

Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari UUD 1945 memutuskan pembubaran partai politik Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum memberikan keputusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau tindakan tercela. Proses pemakzulan itu akan dimulai jika ada dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 anggota dari keseluruhan anggota DPR.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan yudikatif. UUD 1945 telah menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara.

Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja dengan cara:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
- c. Menetapkan calon Hakim Agung
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR